
Review Buku

Endriady Edy Abidin,

Prodi HI, FISIP, Universitas Sulawesi Barat.

eea@unsulbar.ac.id

Pengarang : Faris Al-Fadhat

Judul : *The Rise of International Capital: Indonesia Conglomerates in ASEAN*. Singapura: Palgrave Macmillan, 2019, xix + 279 hal. ISBN 978-981-13-3190-9,

Harga : US\$ 99.10 (Hardback); 978-981-13-3191-6 US\$ 89.09 (ebook, PDF)

Buku yang ditulis oleh Faris Al-Fadhat ini mengkaji bagaimana kekuatan kapitalis domestik dalam persenyawaannya dengan negara melebarkan sayapnya dengan menjadi kelas kapitalis transnasional dalam konteks regional Asia Tenggara. Buku ini menjadi sangat menarik terutama dalam sumbangannya untuk memahami bagaimana metamorfosis kapitalisme domestik dan perkembangannya, kolaborasinya dengan negara, serta ekspansinya untuk memperluas akumulasi kapital dalam skala Asia Tenggara. Buku ini juga mengokohkan apa yang disebut oleh Leslie Sklair sebagai kelas kapitalis transnasional (2002: 98-99) yang memiliki ciri khas antara lain memiliki kepentingan yang terkait antara lokal dan global dan kontrol politik baik di level domestik maupun di level internasional. Kelas ini, lanjut Sklair, memiliki misi untuk

mengorganisasikan kondisi di mana kepentingannya dan kepentingan sistem global dapat diteruskan dalam konteks transnasional, antar-negara, nasional, dan lokal (2002: 99).

Buku Al-Fadhat ini juga menarik karena mengisi ceruk dalam kajian-kajian perkembangan regionalisme ekonomi yang marak pasca perang dingin. Menurut Faris, teori Hubungan Internasional yang mengkaji regionalisme hanya menekankan integrasi ekonomi atau menganalisis kegagalan atau kesuksesan organisasi tersebut (hlm. 2). Lebih jauh, menurut penulis, studi yang ada saat ini lebih memberatkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembuatan kebijakan negara semisal faktor institusional dan sistemik serta insentif yang melatari proses tersebut (Hlm. 2).

Kajian-kajian ini abai dalam melihat kekuatan sosial dan politik yang berkontestasi dalam politik domestik dan mempengaruhi pengambilan kebijakan negara yang nantinya akan mendorong terbentuknya kerjasama regional dan tatakelola yang mengaturnya. Model yang ditawarkan oleh penulis dalam mengisi lubang terbuka dalam studi regionalisme ekonomi disebut sebagai pendekatan relasi sosial. Studi ini memiliki kemiripan dengan pendekatan ekonomi politik yang mengakui pentingnya peran politik dalam institusi negara. Yang membedakan studi relasi sosial dengan studi ekonomi politik adalah ‘negara memainkan peran substansial dalam memfasilitasi ekspansi kapital di luar dari batas-batas wilayah negara tersebut terutama melalui proyek integrasi ekonomi kawasan’ (hlm. 4).

Buku yang dikembangkan oleh sang penulis dari disertasinya di Asia Research Center, Universitas Murdoch, Australia, ini berargumen bahwa ‘tatakelola ekonomi regional dibentuk sebagai bagian yang lebih luas dari internasionalisasi kapital di mana kegiatan mengakumulasi keuntungan dilakukan melampaui batas-batas wilayah negara’ (hlm. 3). Tatakelola ini, lanjut Faris, ‘menjadi fondasi ekspansi kapital ke seluruh kawasan terutama melalui regionalisasi

aliran perdagangan, jaringan produksi, dan investasi kapital’ (hlm. 3). Di balik proses ekspansi ini adalah kelas kapitalis transnasional yang beraliansi dengan kekuatan sosial-politik lain dalam merestrukturisasi negara untuk mendukung proyek integrasi regional dan internasionalisasi kapital (Hlm. 3).

Dalam konteks Asia Tenggara restrukturisasi negara dan internasionalisasi kapital menghasilkan integrasi ekonomi ASEAN (Bab 4). Integrasi ini dalam berbagai skema kesepakatannya tidak lebih merupakan perwajahan dari kepentingan modal besar yang difasilitasi oleh berbagai negara ASEAN agar dapat memperluas ruang akumulasi kapitalnya. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan kapitalisme di kawasan ini berjaln erat dengan kekuasaan sejak lama (hlm. 67). Di Singapura (hlm. 68-72), misalnya, partai yang berkuasa sejak tahun 1959, People Action Party (PAP), menggabungkan antara partai dan negara dan mengontrol aspek kehidupan publik demi strategi industrialisasi dan untuk menarik investasi asing dalam jumlah yang besar.

Berbeda dengan negara di kawasan Asia Tenggara yang menggalakkan industri substitusi impor, sejak pecahnya Federasi Malaya, Singapura menekankan industri

berorientasi ekspor. Kapital yang dikontrol oleh negara kemudian menghasilkan berbagai perusahaan yang memiliki keterkaitan kuat dengan pemerintah. Ketika ekonomi Singapura semakin maju sedangkan pasar dalam negeri terbatas, Singapura kemudian melahirkan kebijakan internasionalisasi dan mempromosikan integrasi regional. Dari sini, kuasa kapital Singapura terus berkembang dan bertambah signifikan keberadaannya dengan komunitas ekonomi ASEAN.

Dalam konteks Malaysia, kolaborasi modal dan negara juga terjadi (hlm. 72-76). Pasca konsolidasi kekuasaan kelompok etnis Melayu setelah kemerdekaan negara ini, pemerintah menelurkan Kebijakan Ekonomi Baru (KEB) pada tahun 1971 yang melahirkan kelas kapitalis baru: kelompok pribumi. Kebijakan internasionalisasi modal di Malaysia sendiri terjadi sejak pertengahan tahun 1980an. Berbagai kerjasama antara pribumi dengan modal asing menjadi massif demi mendukung proyeksi pemerintahan Mahathir yang hendak menjadikan Malaysia negara maju di tahun 2020.

Di bawah rezim Mahathir, pemerintah memfasilitasi borjuasi Malaysia agar dapat mengakumulasi kapital dalam skala yang lebih besar. Untuk itu, pemerintah mendorong liberalisasi

perdagangan termasuk tatakelola ekonomi regional di Asia. Salah satu yang didorong oleh Malaysia, walaupun kemudian gagal, adalah *East Asia Economic Caucus* (EAEC). Malaysia juga belakangan pendukung kuat terbentuknya ASEAN Free Trade Area (AFTA). Ketika integrasi ekonomi ASEAN kian menguat, ekspansi modal Malaysia di kawasan ini semakin nyata. Dua contohnya adalah Maybank dan CIMB Group Berhad yang menjadi bank terbesar di Asia Tenggara dan memiliki bisnis di berbagai negara anggota ASEAN.

Serupa dengan Malaysia, internasionalisasi kapital Thailand juga terjadi sejak pertengahan 1980an, ketika ekonomi Thailand bergeser dari industri substitusi impor ke industri yang berorientasi ekspor (Hlm. 77-81). Para kapitalis besar Thailand kemudian didorong oleh negara agar beraliansi dengan berbagai perusahaan global dalam bentuk usaha patungan agar dapat memiliki posisi yang lebih kuat di pasar internasional. Berbagai aliansi yang terbangun berhasil meningkatkan skala kapital konglomerat Thailand. Ini dibuktikan dengan kemampuan mereka, misalnya dalam industri otomotif, dalam mengakses pasar otomotif di Asia Tenggara dan Asia bahkan merajai 40 % pasar

otomotif Asia Tenggara pada pertengahan 1990an.

Dalam kasus Indonesia (Bab 6), ekspansi kapital terjadi sejak tahun 1980an pada era Orde Baru (Hlm. 127). Orde Baru dalam masa puncak kekuasaannya merupakan patron sekaligus pelindung bagi banyak konglomerate yang dalam kajian Richard Robison dalam karyanya *Indonesia: The Rise of Capital* disebut mengisi ruang-ruang ekonomi skala besar yang ditinggalkan oleh kolonialis Belanda dan sangat dekat dengan kekuatan politik dan turut membentuk kekuasaan negara (1986). Pasca krisis finansial Asia 1997-1998 (Hlm. 129-159), terdapat dua fenomena menarik yang muncul: *Pertama*, konglomerat Indonesia kian memperluas ekspansi internasionalnya, terutama ke kawasan Asia Tenggara melalui investasi dalam skala yang besar, akuisisi, dan usaha patungan, kapitalis Indonesia mampu mengamankan kontrol yang substansial terhadap beberapa perusahaan strategis di Asia Tenggara. *Kedua*, masuknya berbagai konglomerat, yang memiliki kekuatan kapital internasional, ke dalam politik elektoral pada era pasca-reformasi yang mengakibatkan reorganisasi kelas kapitalis dan mengubah kekuatan bisnis menjadi kekuatan politik yang dominan.

Akibat yang ditimbulkan dari konglomerat-politisi ini adalah semakin meningkatnya pengambilan keputusan kebijakan yang menguntungkan kepentingan ekonomi mereka dan kemampuan untuk mengarahkan perimbangan kekuatan politik yang menguntungkan mereka. Pada gilirannya, posisi dominan kapitalis dalam struktur politik memiliki pengaruh besar dalam cara pandang kebijakan ekonomi Indonesia termasuk proyek integrasi ekonomi ASEAN. Yang juga berpengaruh dalam hubungan negara-kapital adalah asosiasi-asosiasi bisnis yang aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Di Indonesia, asosiasi yang memiliki pengaruh kuat adalah Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Asosiasi-asosiasi ini diisi oleh para kapitalis yang tidak jarang menjadi anggota eksekutif kedua organisasi. Sejak 1998, Kadin menjadi tempat artikulasi politik kelas kapitalis di mana arah kebijakan dan strategi lobi ditentukan oleh konglomerat yang memiliki kekuatan kapital di level internasional. Kadin dan Apindo juga merupakan pendukung terkuat liberalisasi ekonomi di level regional ASEAN.

Berbagai dinamika ekonomi politik domestik negara-negara Asia Tenggara di atas, yang dijadikan contoh kasus, terlepas perbedaan konstruksi historis kelas kapitalis masing-masing dan rupa relasi negara-kapitalnya, kesemuanya menekankan restrukturasi negara yang dapat menopang ekspansi kapital di luar teritori negara asalnya dalam bentuk tatakelola liberal ekonomi kawasan yang dalam konteks kontemporer berbentuk *ASEAN Economic Community*. Asia Tenggara tentu saja merupakan sebuah pasar yang menggiurkan mengingat populasi penduduk di kawasan ini mencapai lebih dari 600 juta orang. Liberalisasi ekonomi kawasan akan memudahkan kelas kapitalis transnasional untuk memaksimalkan profit, mendiversifikasikan bisnis mereka, dan menstabilisasi kelangsungan hidup korporasinya secara jangka panjang.

Sebagai kesimpulan, buku yang ditulis Faris Al-Fadhat ini memberikan

pemahaman baru pada kita dalam kajian regionalisme dan ekonomi politik internasional, yang mana keduanya cenderung abai pada relasi sosial kelas yang berkontestasi dalam membentuk arah kebijakan ekonomi politik. Pendekatan yang digunakan memberikan lensa baru tentang bagaimana kekuatan kapital bersinergi dengan negara atau menggunakan negara untuk menghasilkan tatanan ekonomi di satu kawasan yang menguntungkan bagi kapitalis-kapitalis tersebut untuk memaksimalkan akumulasi kapital. Sebuah sumbangan yang sangat berharga.

Referensi:

- Robison, R. (1986). *Indonesia: The Rise of Capital*. Sydney: Allen & Unwin.
- Sklair, L. (2002). *Globalization: Capitalism and its Alternatives*. Oxford: Oxford University Press.